

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, pada prinsipnya partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai cita-cita, orientasi, pandangan dan nilai-nilai yang sama. Tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik serta merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan atau kepentingan kelompoknya.

Partai politik adalah alat yang ampuh bagi manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Dari organisasi politik untuk melahirkan urgensi partai politik untuk melahirkan pameo dalam masyarakat “Politisi modern tanpa partai politik sama dengan ikan berada diluar air”.¹

Hubungan antara partai politik sebagai wadah untuk menjadi alat manusia untuk mengendalikan kekuasaan dengan masyarakat sangat luas sekali. Sebagai alat yang ampuh dalam perkembangannya, partai politik di Indonesia telah mengalami pasang surut sampai dikeluarkannya Undang-Undang Bidang Politik yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 yang kemudian direvisi beberapa kali sampai kepada Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik.

¹ Djohermansyah Djohan, Dkk, *Sistem Kepartaian dan Pemilu*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Jakarta. 2002., hal 15.

Pemerintah pada saat itu menyadari bahwa Partai Politik memiliki arti yang sangat penting dan telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik yang demokratis. Aksioma yang berlaku, tidak ada sistem yang berjalan tanpa Partai Politik, kecuali sistem politik yang otoritas atau sistem kekuasaan tradisional, dimana saja atau penguasa dalam menjalankan kekuasaannya sangat bergantung pada tentara atau polisi. Tetapi dalam kehidupan politik modern yang demokrasi dan diterapkannya sistem demokrasi perwakilan, keberadaan partai politik menjadi keharusan, sebab fungsi utama partai politik adalah bersaing untuk memenangkan pemilu, mengagregasikan berbagai kepentingan masyarakat, menyediakan alternatif kebijakan dan mempersiapkan para calon pemimpin yang duduk dalam pemerintahan. Dengan demikian partai politik, menjadi sarana penghubung kepentingan rakyat dan pembuat kebijakan dalam pemerintahan demokrasi.² Salah satu karya penting yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru dibawah kendali Presiden Soeharto adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini telah diputuskan oleh MPRS dalam ketetapannya No. XI/MPRS/1966, yang dalam rangka pelaksanaannya agar pemerintah bersama-sama DPRD-GR segera membuat Undang-undang serta Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan, serta meninjau kembali berlakunya Penpres Nomor 7 Tahun 1959 dan Penpres Nomor 13 Tahun 1960. Pada tanggal 24 Nopember

² Lawson, *Political Parties dan Linkage: A Comporative Perspektive*. (New Haven, Yale University, 1995), hal 3.

1966 disampaikan oleh Presiden Soeharto kepada DPR-GR sebuah Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan.

Tampilnya Partai GOLKAR sebagai partai besar yang paling lama bertahan dalam kekuasaan pemerintahan, tentu bukanlah sesuatu yang disulap begitu saja langsung menjadi, tetapi adalah suatu proses yang berjangka panjang dalam sejarah ini, selain karena kuatnya bangunan cita-cita ideal atas pendiriannya, yang kemudian berwujud menjadi elemen dasar perjuangannya, juga karena GOLKAR sebagai partai yang pluralis memiliki cukup banyak kader-kader fungsional dan berbagai latar belakang, yang rata-rata dari kalangan terdidik dan terpelajar, yang kemudian menjadi faktor penentu dalam menghantarkan Partai GOLKAR dalam seusianya sekarang ini.

Mereka-mereka itulah yang memenej kelembagaan, struktur dan program Partai GOLKAR sampai ketingkat basis, sehingga selalu menjadi pemenang dalam setiap pelaksanaan pemilu. Pada titik itulah yang sesungguhnya harus selalu disadari dan dipikirkan baik oleh pengurus GOLKAR itu sendiri, maupun oleh pengurus organisasi partai politik lainnya, bahwa dengan faktor kemapanan yang demikian GOLKAR itulah yang menjadikan dirinya tetap *well-established*, meskipun diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan cobaan yang bertubi-tubi dalam setiap perodesasi perubahan kebangsaan. Sehingga para kader-kader GOLKAR membutuhkan konsistensi akan perhatian dan kepeduliannya dalam meningkatkan kinerja dan prospek partainya sendiri.

Kalau dicermati kancah perpolitikan di Indonesia akhir-akhir ini, tampaknya sebagian partai-partai politik yang tergolong besar, keseluruhannya dilanda konflik dan perpecahan, terkecuali partai GOLKAR. Padahal jika ditelaah secara mendalam, GOLKARlah yang semestinya didera pertikaian yang tiada henti, sebagaimana ekstensinya sebagai partai yang menghimpun golongan-golongan yang dengan sendirinya akan memberi adanya perbedaan-perbedaan antara golongan yang satu dengan yang lainnya. Tapi itu tidak terjadi karena GOLKAR tidak mendasarkan pada latar “golongan”, tetapi pada “karya-karya”nya, sebagai esensinya partai yang menganut paham “Kebangsaan”.

GOLKAR menyadari siapapun dari golongan bangsa ini, tetap dihormati kedaulatannya, dalam arti kemanfaatannya bagi bangsa dan Negara, sehingga pada tempatnya diberikan penghormatan pada Partai GOLKAR yang mendasarkan, orientasinya pada “karya-karya”nya, bukan “golongan-golongan”nya. Memberikan peluang kepada semua warga bangsa, untuk berkarya, baik sebagai pemimpin kelompok masyarakat maupun dalam struktur jabatan di jajaran pemerintahan.

Jika kita berbicara tentang mengapa dan bagaimana GOLKAR mampu bertahan hidup dan berperan dalam perpolitikan, era reformasi, dimana dengan kejatuhan Presiden Suharto GOLKAR dihujat habis-habisan bahkan menghendaki GOLKAR dibubarkan atau minimal tidak diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum, tetapi ternyata GOLKAR tetap hidup (*survive*) dan eksis sampai hari ini. Karena itu penjelasan utama dalam tulisan ini adalah faktor-faktor yang menjadi

penyebab tetap eksisnya GOLKAR maupun langkah-langkah kebijakan politik yang ditempuh oleh GOLKAR dalam rangka menyesuaikan diri terhadap lingkungan politik yang telah berubah tersebut, sehingga kekuatan politik ini mampu tetap berperan dalam perpolitikan nasional era reformasi yang demokratis.

Bila dikaitkan dengan perspektif teori kelembagaan, sebagaimana disinggung oleh Moses Maor, sebelum partai itu bertahan (*persist*) partai tersebut harus eksis (*survive*). Partai Politik akan *survive* apabila dapat memberi manfaat kepada para kandidat Partai Politik tersebut maupun para pemilihnya pada pemilu. Selanjutnya Samuel P. Huntington yang membahas tentang kelembagaan politik menyatakan bahwa agar Partai Politik survive, partai tersebut harus memiliki kelembagaan yang kuat.³

Huntington mendefinisikan pelembagaan politik sebagai proses dimana organisasi dan prosedur memperoleh nilai baku dan stabil. Huntington mengukur tingkat pelembagaan politik ini dari tingkat adaptabilitas, kompleksitas, otonomi dan kohensi. Menurutnya semakin mudah organisasi menyesuaikan diri (beradaptasi), semakin tinggi pula derajat perlembagaannya. Begitu pula semakin banyak tantangan yang timbul dan semakin tua umur organisasi semakin besar pula kemampuannya menyesuaikan diri terhadap lingkungannya (beradaptasi).

Terkait masalah tersebut, diajukan pula lima indikator penting dalam kelembagaan partai politik yang berbeda:

³ Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven and London, Yale University Press 1968), hal 8-31.

Pertama, tingkat perkembangan organisasi pada pusat kekuasaan, dimana partai politik dengan kelembagaan kuat umumnya memiliki birokrasi pusat yang kuat.

Kedua, tingkat homogenitas organisasi pada level hierarki yang sama cenderung memiliki struktur yang sama dengan organisasi pada tingkat nasional.

Ketiga, pendanaan organisasi semakin bersifat regular dan berasal dari berbagai sumber.

Keempat, hubungan dengan organisasi-organisasi *onderbouw*, dimana partai politik dengan kelembagaan yang kuat mendominasi organisasi-organisasi eksternalnya.

Kelima, tingkat kesesuaian antara norma hukum dan struktur kekuasaan yang aktual. Tingkat kesesuaian antara keduanya lebih besar dalam partai politik yang memiliki kelembagaan kuat.

Gambaran besar GOLKAR sebagaimana telah disampaikan di atas secara sekelumit, juga berlangsung di Kota Tarakan. Kota Tarakan yang terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 1997 dengan nama Kota Madya Daerah Tingkat II Tarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tarakan sebagai badan Legislatifnya dengan 20 anggota dewannya, 11 orang diantaranya berasal dari utusan perwakilan Partai GOLKAR. Keberadaan GOLKAR dilembaga perwakilan ini merupakan mayoritas karena melebihi dari separuh kursi yang tersedia.

Pada pemilu 1999 di Kota Tarakan GOLKAR dapat meraih suara terbanyak dengan 9 kursi dan pada pemilu 2004 yang lalu GOLKAR meraih 8 kursi dari 25

kursi yang tersedia dan masih memegang kendali sebagai partai yang dapat mempengaruhi kebijakan. Perkembangan nyata yang ditampilkan GOLKAR di daerah ini merupakan kinerja kelembagaan politik yang sudah berjalan begitu mapan dan memperlihatkan sebagai sebuah institusi politik yang terbilang cukup dewasa dan besar.

GOLKAR memang sepatutnya dapat dijadikan sebagai “Sekolah Politik”, melalui perkembangannya baik menyangkut bidang Organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendanaan, yang mampu mewarnai kehidupan perpolitikan nasional sampai secara luas kedaerah-daerah. DPD GOLKAR Kota Tarakan berkewajiban dengan beberapa fungsinya antara lain melaksanakan Pendidikan Politik (*Political Education*), Sosialisasi Politik (*Political Socialization*), Seleksi Politik (*Political Selection*), Pemanduan Politik (*Political Agregation*), Memperjuangkan Kepentingan Politik (*Interes Articulation*), Komunikasi Politik (*Political Communication*) dan Pengawasan Politik (*Political Control*).

Secara khusus kita bicarakan tentang Pendidikan Politik Masyarakat, bahwa DPD GOLKAR Kota Tarakan berkewajiban mendidik anggota-anggotanya dan masyarakat sesuai asas, tujuan dan program yang ingin dicapainya, mendidik manusia sebagai anggota masyarakat yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk bela Negara sesuai kedudukan dan keahliannya masing-masing. Kita mencoba melihat bagaimana peranan tingkat pendidikan dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan berfungsi untuk memberikan atau membentuk tahap-tahap kecerdasan

politik anggota masyarakat. Dengan ini diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka kesadaran politik tinggi yang disebabkan oleh tingginya kualitas pendidikan atau tersebarnya pendidikan didalam masyarakat, maka partisipasi politik tinggi.

Di Indonesia, dapat dikatakan bahwa Pendidikan belum begitu merata didalam masyarakat dan juga terdapat perbedaan kualitas Pendidikan yang diterima oleh lapisan masyarakat kita. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa kesadaran politik masyarakat Indonesia pada umumnya masih rendah. Tetapi dalam wilayah-wilayah tertentu yang kualitas pendidikannya tinggi, terdapat kesadaran politik yang paling tinggi bagi sebagian anggota masyarakat. Tinggi rendahnya kesadaran politik oleh masyarakat indikatornya tidak hanya ditentukan dari tingkat pendidikannya saja tetapi juga mencangkup bagaimana tingkat kehidupan ekonomi dan sosial budaya yang berkembang.

Maka tidaklah berlebihan jika Partai Politik juga harus giat untuk melaksanakan Pendidikan Politik terhadap anggota-anggotanya dan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbangsa dan bernegara terutama peran aktifnya melalui Partai Politik yang merupakan sarana demokrasi dalam menyalurkan tuntutan/aspirasi dan memperjuangkan kepentingan pembangunan nasional yang dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah, untuk

mewujudkan cita-cita yaitu pembangunan manusia di Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: *“Bagaimana peran Partai GOLKAR dalam Pendidikan Politik Kader di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur 2004-2007”?*

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Partai GOLKAR dalam Pendidikan Politik Kader di Kota Tarakan Tahun 2004-2007.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan peneliti tentang peran Partai GOLKAR dalam pendidikan politik kader di Kota Tarakan. Dan menjadi sumbangan bacaan ilmu pengetahuan serta pendidikan khususnya di bidang politik.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori ini menggambarkan dari mana problem riset berasal atau teori itu dikaitkan. Menurut Sofian Effendi teori itu adalah: “Rangkaian kata-kata yang logis dari proposional akan lebih dan merupakan informasi ilmiah yang

⁴ Nazaruddin Syamsuddin, MA Dkk, *Pusat Penerbitan Universitas Terbuka*. Jakarta 2001, hal 327.

diperoleh dari dengan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan proposisi”.⁵

Proposisi Kerlinger mengatakan: “teori adalah seperangkat *counstruct* konsep yang saling berhubungan, definisi-definisi atau proposisi yang menjadikan pandangan secara sistematis dengan meramal gejala”.⁶ Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa teori adalah fenomena tersebut. Untuk menjelaskan apa saja konsep-konsep kunci dalam penelitian ini, penulis uraikan pengertian dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian.

1. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Supaya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai partai politik, maka kita perlu kiranya diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian partai politik itu sendiri. Banyak sarjana-sarjana ilmu politik terkenal yang mengemukakan pengertian partai politik, namun pengertian-pengertian itu berbeda. Perbedaan-perbedaan itu tidak mendasar. Kelainan pengertian itu disebabkan oleh perbedaan sudut pandang atau pendekatan dari masing-masing sarjan terhadap partai politik.

Di bawah ini dikemukakan beberapa definisi mengenai partai politik:

⁵ Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Pusat Penelitian dan Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1981, hal. 25.

⁶ Fred Kerliner & Elazar J. Peddhazur, *Korelasi dan Analisa Regresi Ganda*, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1987, hal 52.

- Menurut Carl J. Fredirch, partai politik adalah:
 “Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan pengawasan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pengawasan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatannya yang bersifat ideal maupun material”.⁷
- Menurut Raymond Garfield Gettel memberi batasan bahwa :
 “Partai politik terdiri dari kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai kesatuan politik dan yang dengan memakai kekuasaan memilih tujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.”⁸
- Menurut Mark M Hangopian, partai politik adalah:
 “Suatu organisasi yang dibentuk untuk memenuhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam rangka prinsip dan kepentingan ideologis melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat.”⁹
- Menurut Goerge B de Huszr dan Thomas H Steveson, partai politik adalah:

⁷ Soelistyati, Ismail Ghani, *Pengantar Ilmu Politik*, Tahun 1989, hal 111-112.

⁸ *Ibid*, hal 111-112.

⁹ Mark M, Hangopian, dalam ikhlasul Amal, *Teori Mutakhir Partai Politik*, PT Tiara Wacana 1988, hal 84-85

“Sekelompok orang-orang yang terorganisir untuk ikut serta mengedalikan suatu pemerintahan, agar dapat melaksanakan programnya dalam jabatan.”¹⁰

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui seseorang turut serta langsung atau tidak langsung dalam pemilihan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan, menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik seperti DPR atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye mengikuti kelompok diskusi dan sebagainya.

¹⁰ Sukarna, *Sistem Politik*, Alumni, Bandung, Tahun 1989, hal. 86.

b. Tugas dan Fungsi Partai

Di dalam Negara yang berfaham demokrasi, dimana masyarakatnya merupakan masyarakat heterogen, partai politik mempunyai beberapa tugas, diantaranya adalah:

1. Tugas partai politik adalah untuk menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik mengatur kemauan yang berbeda-beda dalam masyarakat. Disamping itu juga keinginan-keinginan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kesimpangsiuran pendapat di dalam suatu masyarakat, karena pendapat serta keinginan tiap-tiap individu atau orang maupun kelompok orang dalam masyarakat modern adalah sama sekali tidak berarti jika tidak diatur dan dirumuskan bersama-sama pendapat serta keinginan orang lain yang sepaham dan sealaran. Partai politik bertugas untuk menampung semua pendapat dan keinginan rakyat kemudian langkah berikutnya ialah memilihnya dan merumuskannya serta menyerahkannya kepada pemerintah untuk dapat dijadikan program politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin.
2. Partai politik juga mempunyai tugas menyebarluaskan gagasan-gagasan atau ide-ide yang tersusun dalam rencana kebijaksanaan pemerintah.
3. Partai politik mempunyai tugas untuk menumbuh dan memupuk kesadaran akan loyalitas nasional.

4. Demikian juga partai politik mempunyai tugas untuk memberi dan mengajak untuk ikut serta kepada mereka yang kelihatan mampu untuk ikut serta dan aktif dalam lapangan kegiatan politik dan mendidik mereka untuk menjadi kader pemimpin.
5. Tugas lain dari partai politik yaitu mengatur pertikaian. Partai politik merumuskan konflik-konflik dan selanjutnya berusaha untuk menguasai konflik-konflik tersebut serta mencapai penyelesaian.¹¹

Fungsi dari partai politik adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Politik

Proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Proses ini berlangsung secara seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, non formal, dan informasi maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari dalam keluarga maupun masyarakat.

Di dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.¹² Disamping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi berikutnya. Dalam menguasai pemerintahan melalui

¹¹ Soelistyati, Ismail Ghani, *Op.cit.* hal. 113.

¹² Mirriam, Budiarto, *Op.Cit.* hal 163-164.

kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai berusaha menciptakan “image” bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Disamping menanamkan solidaritas dengan partai, partai politik juga mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran.

2. Rekrutmen Politik

Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

3. Partisipasi Politik

Kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pimpinan pemerintah.

4. Memandu Kepentingan

Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses, pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

5. Komunikasi Politik

Proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat kepada pemerintah.

6. Pengendalian Konflik

Mengenai konflik yang timbul dalam sistem politik melalui lembaga demokrasi untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan politik.

7. Kontrol Politik

Kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dari isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.¹³

c. Klasifikasi Partai Politik

Dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotannya, secara umum dikenal ada dua sistem kepartaian yaitu partai massa dan partai kader. Klasifikasi lainnya dapat dilakukan dari segi sifat dan orientasinya dalam dua jenis yaitu partai perlindungan dan partai ideologi.¹⁴

1. Partai Massa

Partai Massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat

¹³ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, 1992, hal. 116-121.

¹⁴ Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1998 hal. 167.

untuk bernaung dibawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya bias dan agak kabur.

2. Partai Kader

Partai kader memetingkan ketaatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggotanya yang menyeleweng dari garis partai politik yang telah ditetapkan.

Klarifikasi lainnya dapat dilakukan dari segi sifat dan orientasinya dalam dua jenis, yaitu:

1. Partai Lindungan

Partai Lindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor, disiplin yang lemah dan biasanya tidak mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud utamanya adalah memenangkan pemilu untuk anggota-anggota yang dicalonkannya

2. Partai Ideologi

Partai ini mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang sangat kuat dan mengikat. Terhadap calon anggota diadakan

saringan, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan disyaratkan lulus dari berbagai macam percobaan.¹⁵

Selain klasifikasi di atas, masih terdapat klasifikasi lainnya. Menurut Maurice Duverger di dalam bukunya yang berjudul *Political Parties* terdapat 3 macam klasifikasi yaitu:¹⁶

1. Sistem Partai Tunggal (*One Party System*)

Sistem Partai Tunggal apabila dalam suatu negara hanya terdapat partai politik saja yang berperan, maka negara dinyatakan menganut sistem partai tunggal, mungkin dinegara tersebut benar-benar hanya dapat satu partai politik saja akan tetapi mungkin pula terdapat partai politik namun yang mempunyai peran yang sangat dominan hanya satu partai politik saja sedangkan partai-partai yang lainnya hampir sama sekali tidak berperan.

2. Sistem Dwi Partai

Pada umumnya sistem dwi partai dianut oleh negara dimana terhadap dua partai politik yang memainkan peran kehidupan politik. Pada sistem dwi partai, terdapat dua partai yang dominan, maka partai yang memenangkan pemilihan umum dengan sendirinya akan menjadi partai yang memegang kekuasaan. Sebaliknya, partai yang menderita

¹⁵ *Ibid*, hal 166-167

¹⁶ Harianto, *Sistem Politik Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal 98.

kekalahan dalam pemilihan umum akan bertindak sebagai partai oposisi terhadap partai yang sedang memegang kekuasaan.

3. Sistem Multi Partai

Sistem multi partai ini dianut suatu negara dimana terdapat beberapa partai politik (lebih dari dua), dan diantaranya partai-partai politik yang ada mempunyai kekuasaan seimbang.¹⁷

d. Organisasi Partai

Murice Duverger dalam *Political Parties*¹⁸ membedakan organisasi partai menjadi:

1. Organisasi yang vertikal, yang melihat pada satuan-satuan yang merupakan basis dari kehidupan dan kegiatan dari partai itu, tersusun dari hierarki ke atas, keseluruhannya merupakan mesin partai.
2. Organisasi yang horizontal, pembagian ini berdasarkan siapa yang menjadi anggota-anggotanya.

Dalam susunan yang horizontal ini dapat dibedakan antara partai langsung (*directorates*) dan partai tidak langsung (*indirect parties*). Dalam partai langsung, anggota-anggotanya adalah individu atau perorangan. Jadi beranggotakan langsung orang. Sedangkan partai tidak langsung anggota-anggotanya kolektif atau grup sebagai salah satu keseluruhan, masuk dalam suatu partai. Di dalam bentuknya yang murni partai ini tidak mempunyai

¹⁷ *Ibid*, hal 167-169.

¹⁸ Soelistiyati, Ismail Ghani, *Pengantar Ilmu Politik*, hal 116.

anggota individu atau orang, tetapi menghimpun suatu organisasi yang sudah ada. Dasar dari susunan vertikal ini merupakan elemen dasar. Macam-macam elemen yaitu *caucus*, *branch*, *cell*, *militia*.

Caucus adalah suatu satuan dasar dari suatu partai yang terdiri atas golongan kecil orang dan merupakan satu kesatuan yang tertutup partainya. Orang tidak mudah untuk masuk kedalamnya dengan melalui seleksi yang diadakan oleh anggota-anggotanya yang telah ada, karena pengaruhnya. Masuknya orang tersebut dalam *caucus* diharapkan dapat membantu dalam memenangkan pemilihan. Kekuatan *caucus* terdapat pada kualitas anggotanya. Puncak kegiatannya ialah pada waktu pemilihan, oleh karenanya maka *caucus* ini dibentuk dengan daerah-daerah kerja, daerah pemilihan yang penting. *Caucus* selanjutnya masih dibedakan menjadi dua, yaitu *caucus* langsung yang anggota-anggotanya terdiri dari kaum elit, *middle class*. *Caucus* tidak langsung anggota-anggotanya adalah wakil-wakil yang ditunjuk oleh kolektif anggota partai tersebut.

Elemen dasar dari organisasi yang kedua adalah *branch* yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari ikatan partai dan merupakan satuan yang terbuka, bahkan justru selalu berusaha dan memperluas anggotanya. Disamping itu *branch* mempunyai organisasi administrasi yang lebih sempurna dan lebih permanen.

Cell merupakan satuan dasar dari suatu partai. Dalam *cell* dasar pembentukannya adalah lingkungan-lingkungan pekerja (*occupational basis*),

yaitu menghimpun orang-orang yang bekerja pada suatu tempat yang sama. Pada *cell* jumlah anggota tiap distrik sekitar 50 sampai 60 orang. Cell yang ideal anggotanya lebih sedikit yaitu antara 15 sampai dengan 20 orang saja. Dengan demikian terdapat hubungan yang tetap antara anggota-anggotanya, serta rasa solidaritas partai lebih kuat dirasakan.

Elemen dasar yang keempat adalah *militia* yaitu semacam tentara pribadi atau laskar yang diorganisasikan secara hierarkis di dalam ketentraman, jadi di dalam militia terdapat pembagian kelompok seperti regu dan sebagainya.

2. Pendidikan Politik

a. Pengertian Pendidikan Politik

Supaya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai partai politik, maka kita perlu kiranya diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian partai politik itu sendiri. Banyak sarjana-sarjana ilmu politik terkenal yang mengemukakan pengertian pendidikan politik, namun pengertian-pengertian itu berbeda. Perbedaan-perbedaan itu tidak mendasar. Kelainan pengertian itu disebabkan oleh perbedaan sudut pandang atau pendekatan dari masing-masing sarjan terhadap pendidikan politik.

Dibawah ini dikemukakan beberapa definisi mengenai pendidikan politik:

- Menurut Safrudin pendidikan politik adalah:

“Aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan

politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas”.¹⁹

- Menurut Paulo Freire memberi batasan bahwa:

Jika yang dimaksud dengan “Pendidikan” adalah proses menumbuhkan sisi-sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka “Pendidikan Politik” dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk politik . sebagaimana halnya bahwa pendidikan mempunyai fungsi-fungsi pemikiran moral, dan ekonomi, maka pendidikan politik juga mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga pendidikan”.²⁰

- Menurut Sarwono Kusumaatmadja pendidikan politik adalah:

“ Dunia pendidikan dan dunia politik memang merupakan khazanah yang berbeda. Hakikat pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia secara utuh dan paripurna, sedangkan dunia politik sangat erat kaitannya dengan proses bertindak dan mekanisme kebijakan yang

¹⁹ Safrudin, *Pendidikan Politik*, <http://www.Buah.dari.Pendidikan.Politik.go.id>. 17 Maret 2008. Pukul 11.30 wib.

²⁰ Paulo Freire, *Politik Pendidikan*, Pustaka Pelajar, cetakan VI 2007. Hal 229.

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan visi dan *platform* perjuangannya.²¹

b. Kepribadian politik

Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya.

c. Kesadaran Politik

Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh dua metode : dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisipasi politik, ia terwujud dengan keikutsertaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya.

d. Partisipasi Politik

Pendidikan politik dalam masyarakat manapun mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, sekolah, partai-partai politik dan berbagai macam media penerangan. Pendidikan politik juga memiliki dasar dasar ideologis, sosial dan politik bertolak dari situlah tujuan-tujuannya dirumuskan.

²¹ Sarwono Kusumaatmadja, *Pendidikan Politik Bangsa*, www.sarwono.net, 17 Maret 2008, pukul 11.30 wib.

E. Definisi Konsepsional

Konsep adalah suatu bentuk kongkrit dari dunia luar, kemudian ditetapkan dalam alam pikiran sehingga manusia dapat mengenal berbagai gejala yang ada. Dalam pemikiran sosial konsep dapat diartikan, abstraksi dari suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian dan keadaan individu atau kelompok tertentu.²²

Yang dimaksud dengan definisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ada beberapa bentuk kongkrit yang merupakan hasil pengenalan yang telah lama berlangsung, yaitu:

1. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh warga negara republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat dan sarana untuk mengikuti pemilu.
2. Pendidikan Politik adalah: “ Proses membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu”.
3. Aktor Politik adalah pelaku dalam kegiatan politik yang bertujuan untuk mendapatkan nilai-nilai politik. Aktor politik berupa indikator atau individu perorangan dan juga kelompok organisasi yang melakukan kegiatan-kegiatan politik, baik kegiatan politik yang legal dan lemah maupun yang ilegal dan keras.

²² Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1991, hal 34.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian Deskriptif. Adapun pengertian penelitian deskriptif menurut Winarno Surachman adalah:²³

“Penelitian Deskriptif merupakan istilah yang umum dan mencakup beberapa teknik deskriptif diantaranya penelitian yang menuturkan, mengklasifikasi, menggambarkan dan menganalisa data serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang ini dengan menggunakan teknik interview dan dokumentasi”.

Dengan demikian jenis penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menerangkan, menggambarkan, menuturkan dan menjelaskan serangkaian peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan.

2. Unit Analisa

Unit analisa dilakukan pada:

- a. Anggota Partai GOLKAR Kota Tarakan Kalimantan Timur.
- b. Pengurus DPD GOLKAR di Kota Tarakan.
- c. Masyarakat Umum.

²³ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1989, hal 140.

3. Jenis Data

Jenis data berisi penjelasan tentang jenis data yang diperlukan dalam penelitian. Data merupakan informasi mengenai keberadaan konsep penelitian yang kita peroleh dari unit analisis yang dijadikan sebagai sarana verifikasi empiris dalam kegiatan penelitian. Menurut cara/teknik pengumpulannya, jenis data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.²⁴ Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (atau yang terkait dengannya) yang diperoleh langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari, yaitu Peran DPD Partai GOLKAR Dalam Pendidikan Politik Kader.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi berupa buku-buku ilmiah, kutipan hasil penelitian, data statistik, media masa/elektronik, dan dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian, yaitu deskripsi wilayah Kota Tarakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka teknik yang digunakan adalah:

- a. Wawancara, yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tulisan tentang masalah yang

²⁴ Tim Penyusun Buku Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY. 2006. Buku Panduan Penulisan Skripsi (S-1), Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY, Hal 22.

dibahas. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan: Para anggota dan pengurus DPD Partai GOLKAR di Kota Tarakan

- b. Dokumentasi atau biasanya disebut sebagai studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan melihat data, catatan, buku, arsip, surat, dokumen, gambar atau grafik. Dokumentasi tersebut diambil dari kantor Partai GOLKAR yang ada di kota Tarakan.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif interpretatif. Analisa kualitatif interpretatif adalah penelitian dengan berusaha menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada, muncul, terjadi dari data-data yang terkumpul tanpa menggunakan perhitungan statistik.²⁵ Pendekatan interpretatif dalam ilmu sosial dimulai dengan pemahaman data/fakta yang dikumpulkan dan kemudian dicoba dianalisis melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar empiris.

Winarno Surakhman menyatakan bahwa analisis data yang digunakan dalam studi ini meliputi empat tahapan berikut ini:

- a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dalam teknik observasi, wawancara dan studi pustaka;

- b. Pencocokan data yang diperoleh dan penyesuaian data dengan kenyataan yang ada di lapangan;

²⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, 1989, hal 171.

c. Interpretasi data

Langkah interpretasi data ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan penilaian data, tetapi langkah ini membutuhkan kecermatan yang harus dibekali seperangkat kerangka konseptual yang telah disusun.

d. Penarikan Kesimpulan dari pengumpulan, penilaian dan interpretasi data.²⁶

²⁶ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Resert*, Bogor, 1989.